

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan perkembangan data-data komposisi penjualan tenaga listrik, pendapatan penjualan tenaga listrik, daya tersambung, jumlah pelanggan dan daftar tunggu permintaan Di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang periode tahun 1997-2006, dimana pada tahun 2005, kWh terima 28.642.494.870, pemakaian 28.643.494.870. kWh, daftar tunggu permohonan daya yang belum terlayani sejumlah 1.273.768,96 KVA, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai *public service* tidak mampu memenuhi pasokan listrik sesuai dengan permintaan penambahan daya yang seharusnya didistribusikan.

2. Berdasarkan hasil analisis perhitungan untuk asumsi pemenuhan tahun 1996 – 2010, maka prediksi kebutuhan energi listrik pada Tahun 2010 di Wilayah Tangerang berjumlah 8.136.151.914 kWh, dengan persentase kenaikan kebutuhan energi listrik setiap tahun rata-rata sekitar 7 %, sedangkan kapasitas kWh siap jual setiap tahunnya hanya mampu sekitar naik 5% dengan prediksikan kWh siap jual pada tahun 2010 sebesar 7.322.536.723 kWh. Dengan kondisi seperti ini, dan dikaitkan dengan kapasitas kemampuan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang seperti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2010 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai *public service* tidak dapat memenuhi permintaan energi listrik di wilayah Tangerang.

3. Ketidakmampuan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam memenuhi permintaan energi listrik di wilayah Tangerang sesuai kebutuhan maka akan berdampak pada berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Sektor rumah tangga, pekerjaan rumah tangga menjadi terhambat dan lambat, demikian pula bagi kelangsungan belajar dalam keluarga, dengan tiadanya penerangan yang cukup akan mengganggu pembelajaran dan terganggunya kesehatan mata.

- b. Sektor sosial, aktivitas kegiatan sosial seperti peribadatan, pertemuan-pertemuan warga, kegiatan di panti-panti akan terganggu kelangsungannya bahkan berkurang atau terhenti.
- c. Sektor bisnis, terganggunya transaksi perekonomian yang dihasilkan dari kelangsungan kegiatan sehari-hari seperti di Bank, Pusat-pusat Perekonomian Masyarakat (Sentra Perekonomian) seperti *Mall*, bioskop, hotel dan lain-lain. Terganggunya transaksi ekonomi pada sektor bisnis akan menimbulkan kerugian bahkan memungkinkan adanya PHK terhadap karyawannya. Konsekuensi dari PHK akan menciptakan peluang dan ruang terjadinya pengangguran maupun kejahatan.
- d. Sektor industri, berdampak kepada tidak tercukupinya target produksi baik kuantitas maupun kualitas yang akan mengganggu stabilitas ketahanan ekonomi.
- e. Sektor instansi, berdampak terhadap kelancaran pelayanan publik, rumah sakit, transportasi, pelayanan distribusi umum yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak.

Ketidakcukupan maupun ketiadaan energi listrik dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dapat mengganggu ketahanan ekonomi, selanjutnya ketidakstabilan ketahanan ekonomi akan berdampak pada stabilitas keamanan, dengan demikian stabilitas ketahanan wilayah Tangerangpun akan menurun.

B. Saran

Sebagai akibat dari kesimpulan butir (1) dan (2) dan keterbatasan penemuan, diakui tidak dapat digunakan untuk *scope* nasional, maka disarankan untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai berikut :

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, serta untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal penyediaan tenaga listrik sehingga tidak lagi ketergantungan dari energi transfer sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI) sebagai pemasok utama melalui jaringan SUTET, disarankan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membangun sendiri Pembangkit Listrik. Apabila sistem pembangkit permanen ada kendala

dalam hal antara lain pembebasan lahannya dapat dibuat dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung milik PLN seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Seiring dengan harga minyak mentah dunia yang terus naik mendekati US\$ 150 per barel. Sedangkan subsidi untuk PLN dipatok Rp 60,3 triliun dengan asumsi harga minyak mentah dunia US\$ 95 per barel, dalam rangka penghematan, apabila bahan bakar solar mengalami krisis pengadaannya, maka disarankan untuk bahan bakar PLTD Apung menggunakan bahan bakar “marine fuel oil” pengganti solar (Solar bakar untuk kapal).

Alternatif lainnya adalah membangun PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) dengan menemukannya di Pulau yang kosong/tidak berpenghuni. Pembangunan PLTN diasumsikan akan menjadi pro-kontra di masyarakat, oleh karenanya PT PLN harus dapat mensosialisasikan guna meyakinkan kepada masyarakat mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan bahan bakar nuklir, sehingga masyarakat akan dapat menerimanya. Alasan-alasan yang dapat disarankan untuk pembangunan PLTN adalah bahwa bahan bakar nuklir merupakan sumber listrik alternatif, sedangkan sumber konvensional (minyak, batu bara dan gas) makin menipis, dan harga listrik PLTN dapat kompetitif. Terkait isu pemanasan global, PLTN selama operasi tidak mengemisikan gas rumah kaca CO₂. Berdasarkan analisis daur hidup (penambangan uranium, pemurnian, pengoperasian PLTN, pengolahan limbah, penyimpanan limbah, dan pembongkaran instalasi PLTN), tenaga nuklir mencapai akhir daur gunanya (use cycle), lebih rendah daripada sumber konvensional yang menghasilkan emisi CO₂, oleh karenanya PLTN adalah sumber energi berkelanjutan.